



► FASILITAS DEWAN

Tunjangan Naik, Kinerja Harus Lebih Baik

UMBULHARJO—Kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja harus dibarengi dengan peningkatan kinerja.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Lukas Ispandiarneo berharap dengan kenaikan tunjangan harus diimbangi dengan kinerja. Selama ini, kata dia, Dewan terus mendapat sorotan karena kinerjanya dipertanyakan. "Cukup banyak persoalan di Jogja mulai dari dugaan pungli, ketimpangan ekonomi, kemacetan yang dipicu karena merebaknya hotel. Dimana fungsi pengawasan Dewan," ujar Lukas, Jumat (4/8).

Selain itu, Lukas juga memperingatkan agar Dewan berhati-hati dalam penggunaan mobil dinas. Menurutnya Dewan harus mempertimbangkan asas manfaat mobil dinas.

Adapun DPRD Kota Jogja akan mengkaji mekanisme penggunaan mobil dinas. Sebab, dengan adanya kenaikan tunjangan, termasuk tunjangan transportasi, penggunaan mobil dinas rawan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kenaikan tunjangan Dewan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Kami akui sebelum keluarnya PP ini mobil dinas operasional Dewan boleh dibawa pulang. Kami akan mengoreksi standar operasional prosedur penggunaan mobil dinas karena jelas rawan bidikan," kata Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko, Jumat.

Sujanarko mengatakan mobil dinas operasional yang sering dibawa pulang selama ini adalah mobil operasional alat kelengkapan (Alkap) Dewan. Ia mengklaim ada aturan membolehkan mobil dinas dibawa pulang karena Dewan

tidak mendapat tunjangan transportasi. Namun, kini adanya PP baru menjadi kekhawatiran menggunakan mobil dinas.

Mobil dinas operasional yang ada di DPRD Kota Jogja saat ini empat unit untuk Komisi A, B, C, dan Komisi D, satu unit di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), satu unit untuk Badan Anggaran (Banggar), dan satu unit untuk Badan Musyawarah (Bamus). Sebagian besar adalah Toyota New Kijang Innova.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang biasa disapa Koko ini menyatakan segera menggelar rapat dengan semua pimpinan alat kelengkapan Dewan terkait dengan aturan penggunaan mobil dinas. "Supaya ada perubahan paradigma terkait dengan penggunaan mobil dinas," ujar Koko.

Anggota DPRD Kota Jogja Suwanto mengakui hampir semua mobil dinas operasional Dewan dibawa pulang, kecuali mobil operasional Kia Traveller. Ia setuju setelah ada tunjangan transportasi semua mobil dinas Dewan harus diparkir di Gedung DPRD, kecuali untuk kepentingan tugas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono juga meminta Dewan membuat standar operasional prosedur (SOP) penggunaan mobil dinas agar tidak menjadi temuan.

Perda turunan PP No.18/2017 rencananya akan disahkan dalam bulan ini sehingga September mendatang kenaikan tunjangan sebagaimana diatur dalam PP tersebut dapat dicairkan. Kadri mengaku tidak ada persoalan dengan anggaran untuk tunjangan Dewan karena PP itu diakuinya menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Ia memperkirakan tambahan tunjangan Dewan selama September-Desember sekitar Rp3,6 miliar.

Tindak Lanjut Ditanjungi Diketahui Jumpa Pers

Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005